

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Absori, Kelik Wardiono, & Natangsa Surbakti 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi Surakarta: Fakultas Hukum UMS*, hal.18.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, Hlm. 107
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Sinar Grafika, hlm. 224
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 45.
- Andarisman Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 73.
- Aro Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP*, Jakarta, Cet I, 1999, h. 257
- Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar, Fadillah Syarif, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.
- Chazawi Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.69
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527
- Dimiyati, Khudzaifah & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004)* hlm.12
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

- H. Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 104
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama*, Jakarta, hlm. 7.
- Hamzah, Hatrick, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)* (Jakarta : Rajawali pers, 1995), hlm. 12.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 63.
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012,hlm. 18-19
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana* , Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK- Indonesia ,2012 , Yogyakarta, hlm 80
- Indriyanto, Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.
- Kanter E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h. 253).
- Kelsen, Hans , *Pengantar Teori Hukum* , Nusa Media, 2006 , Jakarta , hlm 65.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami untuk Membasmi: *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006
- Magnis Frans, Suseno, 1987, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 85
- Manan Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta, FH UI Press, hal.11
- Maramis, Frans 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85
- Margono, *Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 51.
- Marpaung, Leden , *Asas- Teori- Praktik : Hukum Pidana* , Sinar Grafika , Jakarta , 2014, hlm 9

- Marzuki Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana*, hal. 141.
- Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Penelitian Hukum, Cet 2, Jakarta: Kencana*. hlm. 29
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25
- Mukti, Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)*, Hlm 74
- Muladi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136
- Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*,(Jakarta: Zikhru‘i Hakim,1997),cet pertama
- Poerwadarminta, WJS 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka*, Jakarta, hlm. 524.
- Prasetyo, Teguh , *Hukum Pidana* , Rajawali Pers ,2011 , Jakarta , hlm 98
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo: Jakarta. Hal 227
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 20.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 69
- Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992,
- Soekanto, Soekanto, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984*, hlm. 252

- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1994.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999
- Sudarto. *Hukum dan pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.205
- Syamsudin, M *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2007),hlm. 56
- Zinal Abidin, Farid , *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta , hlm 266.

### **Jurnal**

- Affandi R. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 November 2018
- Arifin, Arini. TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015. Diakses pada 15 februari 2022
- Gribaldi, Muhammad, 2013, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK)
- Kamadhis UGM. (2007). *Eka-Citta Bersatu dalam Dharma*. Buletin Kamadhis UGM Nomor.XXVII/September/2007. Kamadhis UGM, Yogyakarta
- Muqaddas, Busyro, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), h. 21
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Hal. 344.
- Subhan, Muhammad. *Pandangan Agama Islam terhadap Korupsi*. Abfa.sch.id. 14 Mei 2020. Diakses pada 15 Februari 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 25 tahun 2002

Keputusan Menteri Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum,

Undang – Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan,

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)